

Jokowi: Efek Pencabutan PPKM akan Kelihatan pada Februari

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap aktivitas perdagangan bisa kembali semarak seperti sebelum pandemi Covid-19. Menurut Jokowi, efek pencabutan PPKM bakal terlihat pada Februari.

"Termasuk yang kedua setelah pencabutan PPKM kita harapkan UKM-UKM, outlet, toko-toko kecil semuanya bisa semarak lagi seperti sebelum pandemi, kita harapkan gitu, tapi kan baru aja kan, baru seminggu dua minggu. Saya kira efeknya akan kelihatan nanti di bulan Februari," kata Jokowi setelah meninjau Pasar Sentul, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), seperti dalam video di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (8/1).

Kepala Negara mengunjungi Pasar Sentul untuk mengecek harga barang-barang setelah momen tahun baru 2023. Dia mengatakan mayoritas harga masih stabil.

"Hanya satu mungkin beras yang memang naik, tapi saya melihat nanti di bulan Februari akan mulai turun beresnya karena kita mulai panen," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi berharap kondisi di pasar-pasar di daerah lain di Indonesia masih stabil. Jokowi berharap kebijakan pencabutan PPKM memberikan dampak signifikan bagi aktivitas perdagangan.

"Kita harapkan stabilitas seperti ini tidak hanya terjadi di Yogya saja tapi juga di pasar-pasar lain di provinsi lain," ujarnya. ● han

Hadir di Acara PPP Yogyakarta, Sandiaga Uno Diteriaki 'Presiden'

YOGYAKARTA (IM) - Sandiaga Uno menghadiri acara Silaturahmi Akbar PPP DIY di Stadion Kridosono, Jogja, Minggu (8/1). Dalam kesempatan tersebut politikus Partai Gerindra itu tampak mengenakan sarung hijau, berbau koko putih dan peci hitam.

Berdasarkan pantauan di Stadion Kridosono, Jogja, Minggu (8/1), Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono datang lebih dulu sebelum Sandiaga Uno. Acara ini dihadiri massa simpatisan PPP.

Tampak pula hadir Muhammad Romahurmuziy, Arwani Tomafi, Musyaffa Noer,

dan Achmad Baidowi. Nama Sandiaga Uno pun dielu-elukan ribuan simpatisan PPP yang hadir memadati Stadion Kridosono. Bahkan salah satu simpatisan meneriakkan, "Sandi Presiden!"

Ketua DPW PPP DIY, Muhammad Yazid, dalam sambutannya mengatakan PPP merasa terhormat dengan kehadiran Sandiaga Uno.

"Insyaallah Pak Sandiaga akan berkhidmat di PPP. Beliau bukan sosok yang asing bagi PPP. Sehingga, sudah saatnya, Pak Sandiaga kembali ke jalan yang benar untuk memperjuangkan PPP," ujarnya. ● han



FOTO: ANT

HARI BHAKTI KE-77 PASPAMPRES

Prajurit Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) unjuk kebolehan evakuasi melalui 'fast rope' usai Upacara Hari Bhakti ke-77 Paspampres di Markas Komando Paspampres, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1). Hari Bhakti ke-77 Paspampres bertepatan dengan Semangat Hari Bhakti Kita Tingkatkan Profesionalisme, Kesetiaan, dan Kewaspadaan Dalam Rangka Melaksanakan Pengamanan VIP'.

Dua Orang Bule di Legian Bali Diserang Anjing Positif Rabies

LEGIAN (IM) - Dua orang bule diserang anjing liar di Jalan Werkudara, Kelurahan Legian, Kabupaten Badung. Setelah dilakukan uji laboratorium, terungkap bahwa anjing tersebut positif rabies. Sayangnya keberadaan dari kedua

aktivis satwa untuk melakukan relokasi anjing-anjing liar ke tempat yang layak, sehingga wisatawan tetap nyaman dan aman berlibur di legian khususnya di pantai," kata Eka, Minggu (8/1).

Selain menggigit wisatawan asing, anjing tersebut juga menggigit dua warga lokal, warga lokal tersebut telah menjalani vaksin anti rabies, namun dua bule yang digigit anjing rabies tersebut hingga saat ini belum diketahui keberadaannya.

Lurah Legian, Ni Putu Eka Martini mengemukakan keras aksi pembuangan anjing liar ke objek-objek wisata di Legian salah satunya di Pantai Legian, dirinya juga akan menghimbau warga-warga yang memiliki anjing untuk mengandangkan peliharaan mereka.

"Kita bekerja sama dengan

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, Gede Asrama mengatakan, dari data petugas peneliti, sedikitnya ada 80 anjing liar yang tersebar di Kelurahan Legian, terhadap anjing liar ini pihaknya akan melakukan darurat vaksinasi.

Pemberian vaksin rabies terhadap anjing di legian sebetulnya sudah berjalan di semua banjar pada 2022 lalu, dengan capaian baru 73 persen dari populasi anjing di Legian.

"Pada awal tahun ini, vaksinasi akan diprioritaskan untuk anjing liar di Pantai Legian yang berpotensi menggigit wisatawan," kata Asrama. ● mei

Santer Isu Reshuffle, NasDem Tegaskan Tidak akan Lepas Dukungan ke Jokowi

JAKARTA (IM) - Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menegaskan tak akan melepaskan diri dari koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin di tengah isu reshuffle kabinet menguat. reshuffle kabinet merupakan sepenuhnya hak prerogatif presiden.

"Saya tentu tidak bisa mengandai-andai menteri mana (yang di reshuffle), kapan yang akan dilakukan reshuffle oleh presiden karena itu ada pada hak presiden," kata Plate usai pertemuan bersama delapan pimpinan parpol parlemen di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1).

"Namanya reshuffle dapat terjadi setiap saat dan kepada semua anggota kabinet dari unsur partai apapun dan dari unsur nonpartai apapun," imbuhnya.

Plate mengungkap pernyataan Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang memastikan akan tetap bersama koalisi pe-

merintah Jokowi, meskipun pos menteri dari partainya di-reshuffle. Dia menyebut NasDem akan terus konsisten menjaga pembangunan bersama Jokowi.

"Ketua Umum NasDem menyampaikan bahwa untuk periode 2024-2029 akan teguh menjaga konsistensi pembangunan nasional yang sudah dirintis oleh kabinet saat ini. Satu yang harus dicatat, the winner never quit and the quitter never win. NasDem itu the winner, NasDem will never quit," kata Menkominfo itu.

Lebih lanjut, Plate mengatakan pihaknya bakal memastikan keberhasilan kabinet Jokowi hingga masa jabatan berakhir di 2024.

"(Never quit) di dalam mengawal pembangunan nasional. Nah kita tidak akan (keluar) karena keberhasilan kabinet begitu pentingnya bagi bangsa dan negara di situasi yang sulit," ujarnya. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PENANDATANGANAN PETISI PERLINDUNGAN ANAK

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (tengah) memberikan sambutan saat penandatanganan petisi perlindungan anak di Sarinah, Jakarta, Minggu (8/1). Gerakan Peduli Anak menggelar penandatanganan petisi untuk meminta agar hak-hak anak dapat dipenuhi oleh orangtua dan meminta kasus kekerasan seksual kepada anak atau wanita tidak diselesaikan secara restorative justice.

Penyidikan Tunggal Jasa Keuangan di UU PPSK Bertentangan dengan KUHAP

OJK menjadi penyidik tunggal atas tindak pidana sektor jasa keuangan. Sebab itu, OJK perlu diawasi oleh lembaga yang berada di luar OJK.

JAKARTA (IM) - Indonesia Police Watch (IPW) menilai Undang-Undang Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang memberikan kewenangan penyidikan tunggal kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertentangan dengan KUHAP. IPW menilai jika OJK mendapat kewenangan tunggal

pengawasan dari orang luar.

"Penyerahan kewenangan penyidikan kepada penyidik OJK kan bertentangan dalam KUHAP, karena dalam KUHAP disebutkan penyidik adalah penyidik Polri dalam kasus tindak pidana umum dan tindak pidana khusus maupun kasus korupsi, apabila dalam kasus investasi keuangan menyangkut kasus korupsi, ke-

jaksanaan juga kewenangannya diambil alih," ujar Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan, Sabtu (7/1).

Sugeng memandang perlu adanya aturan peralihan jika memang kewenangan penyidikan tunggal OJK itu ditetapkan.

"Oleh karena itu, harus dibuatkan suatu aturan peralihan dalam peraturan ini yang dapat mengcover proses pemberian kewenangan kepada OJK tidak bertentangan KUHAP dan peraturan seperti UU Kejaksaan maupun KPK," katanya.

Dia juga mengatakan perlu adanya pengawasan di OJK.

Selain itu, penyidikan OJK juga harus dilandasi dengan kode etik.

Meski begitu, Sugeng menilai pemberian kewenangan penyidikan ini memperhatikan sejumlah kasus yang ditangani polisi yang terkadang mendapat hambatan. Karena itu, menurutnya, OJK diberikan kewenangan tunggal untuk melakukan penyidikan.

Sugeng kemudian juga menyarankan juga agar kewenangan penyidikan terhadap OJK ini diatur rinci dalam UU PPSK.

Sementara, anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sanjaya menyoroti peluang korupsi terkait kewenangan yang diberikan kepada lembaga OJK tersebut. Menurutnya, UU tersebut bisa diubah apabila dalam penindakannya ada perilaku koruptif.

"Kita beri kesempatan

dulu OJK-nya. Kalau ternyata juga ada yang berperilaku koruptif, ya, maka kita ubah saja UU-nya. Bahkan cabut kewenangannya," kata Arsul kepada wartawan, Minggu (8/1).

Menurutnya, kewenangan itu diberikan kepada OJK dengan anggapan lembaga itu lebih memadai dibanding yang lain di dunia keuangan, perbankan, dan pasar modal.

Arsul tak heran jika ada keraguan terhadap jajaran OJK. Pasalnya, Arsul menilai selama ini OJK tutup mata terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi seperti yang membelit Jiwasraya dan ASABRI.

Untuk diketahui UU PPSK disahkan DPR pada 15 Desember 2022. UU itu memberikan kewenangan bagi OJK untuk menyidik tindak pidana sektor jasa keuangan. ● mei

Gerindra Ikut Pernyataan Bersama 8 Parpol Tolak Pemilu Coblos Partai

JAKARTA (IM) - Delapan partai politik parlemen melakukan pertemuan di The Darmawangsa Hotel, Minggu (8/1). Pertemuan itu untuk menegaskan penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai.

Partai Gerindra termasuk dalam barisan kedelapan parpol yang menolak sistem Pemilu proporsional tertutup, meski partai besutan Prabowo Subianto itu tidak ikut hadir dalam pertemuan tersebut.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menekankan sikap partainya ikut dalam kesepakatan tersebut, yakni tidak setuju dengan sistem pemilu coblos partai atau tertutup. Sikap itu pun sudah dinyatakan Gerindra di parlemen.

"Bahwa di Gerindra itu tidak menyetujui sistem proporsional tertutup, di parlemen juga kami secara partai, kami sudah bicara, dan juga bareng-bareng teman di parlemen kami sudah menyatakan untuk membuat pernyataan bersama juga

untuk menolak proporsional tertutup," kata Dasco ketika dikonfirmasi, Minggu (8/1).

Dasco mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto pun sudah menyatakan hal yang sama. Demi asas keadilan dan keterbukaan Prabowo menolak sistem pemilu coblos partai.

"Kemarin ketum kami, dalam peresmian kantor badan pemenangan pilpres juga sudah menyampaikan hal yang sama, bahwa Gerindra untuk asas keadilan dan keterbukaan juga menolak proporsional tertutup dengan alasan bahwa biarkan rakyat memilih wakilnya bukan partai," ucapnya.

Terkait tidak adanya perwakilan Gerindra di 8 pertemuan parpol ini, Dasco menjelaskan kalau Prabowo tengah berhalangan karena ada agenda lain yang sudah terjadwal jauh-jauh hari. Begitu juga dengan Sekjen dan Waketum lain.

"Oleh karena itu, pada prinsipnya Gerindra ikut terhadap sikap menolak proporsional tertutup, tapi memang karena ketum kami

berhalangan ada kegiatan yang sudah diagendakan dan tidak bisa dijadwalkan kembali sehingga berhalangan hadir," ujarnya.

"Demikian juga sekjen dan beberapa waketum sudah diagendakan dari seminggu lalu untuk menyerahkan bantuan korban banjir di Jateng. Saya sendiri dari kemarin sudah berangkat ke luar kota," lanjut Dasco.

Seusai pertemuan 8 parpol di Nusantara Room, Hotel The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjelaskan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Gerindra soal pertemuan hari ini. Meski tidak hadir, Gerindra dinyatakan Airlangga sudah menyetujui isi kesepakatan.

"Yang hari ini tidak terlihat adalah Partai Gerindra, namun Partai Gerindra sudah berkomunikasi baik dengan saya maupun dengan NasDem maupun Pak Ahmad Ali dan sudah menyetujui statement yang dibuat hari ini," ujarnya. ● han



FOTO: ANT

PDIP GELAR MAKAN BARENG JELANG HUT

Sekjen DPP PDIP Perjuangan Hasto Kristiyanto (kedua kanan) didampingi Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga (kanan) menyampaikan sambutan saat acara Makan Bareng 10.000 Warga DKI Jakarta di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (8/1). Kegiatan yang digelar oleh DPD PDIP Perjuangan DKI Jakarta tersebut dalam rangka menyambut HUT ke-50 PDIP.

KPK Ancam Jemput Paksa Dito Mahendra Jika 3 Kali Mangkir dari Panggilan Penyidik

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bisa menjemput paksa pelapor artis peran Nikita Mirzani, Dito Mahendra, jika sampai tiga kali mangkir dari panggilan penyidik.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik telah memanggil Dito pada 8 November, kemudian 21 Desember 2022, dan terakhir 5 Januari 2023.

Sedianya, Dito bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

"Tentu kan sesuai dengan ketentuan hukum acara. Semestinya bisa dilakukan jemput paksa, karena sudah dilakukan pemanggilan, bahkan tiga kali," kata Ali saat dikonfirmasi, Minggu (8/1).

Sebagai informasi, tim penyidik telah mendatangi kediaman Dito Mahendra. Alamat rumah yang dituju mengacu pada data catatan kependudukan. Namun, Dito Mahendra tidak ada di tempat.

Hingga saat ini Dito masih menyandang status saksi. Sementara, upaya paksa yang dilakukan KPK terhadapnya berbeda dengan status tersangka.

"Ini kan saksi ya, sesungguhnya ini saksi bukan atau belum menjadi tersangka, sehingga upaya paksa sebagaimana ketika kemudian KPK melakukan pencarian terhadap tersangka kan beda," tutur Ali.

Jaksa mengingatkan bahwa Dito selaku saksi memiliki kewajiban memenuhi panggilan aparat penegak hukum. KPK meminta Dito paling tidak memberikan konfirmasi mengenai alasan ketidakhadirannya karena sudah tiga kali dipanggil.

Keterangan Dito, kata Ali, sangat penting bagi penyidikan dugaan TPPU Nurhadi agar kasus tersebut menjadi terang.

"Ini sudah tiga kali kami ingatkan yang bersangkutan

setidaknya konfirmasi ke KPK tentang keberadaan dan kesediaannya untuk hadir diperiksa sebagai saksi," kata Ali.

Secara terpisah, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya saat ini tengah memburu Dito Mahendra. Pihaknya mendapatkan informasi Dito tidak memenuhi panggilan pengadilan di Banten dengan alasan memenuhi panggilan penyidik KPK.

Sebaliknya, Dito beralasan kepada KPK bahwa dirinya mengikuti persidangan sehingga tidak bisa menjalani pemeriksaan.

"DM (Dito Mahendra) ini kami sedang mencari. Kalau rekan-rekan ketemu, kabari kami," kata Asep dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (5/1) lalu.

Sebelumnya, KPK telah memanggil wiraswasta, Dito Mahendra untuk menjalani pemeriksaan sebanyak tiga kali. Namun, yang bersangkutan tidak pernah datang.

Nurhadi merupakan terpidana kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Ia dan menantunya, Rezky Herbiyono dinyatakan terbukti menerima suap dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) 2014-2016 Hiendra Soenjoto terkait kepemimpinan dua perkara Hiendra.

Selain itu, Nurhadi dan Rezky juga terbukti menerima gratifikasi Rp 13,787 miliar dari sejumlah pihak yang berkecimpung di tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).

Nurhadi kemudian dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. KPK kemudian mengembangkan kasus ini dan mengusut dugaan TPPU. Sejumlah anggota keluarga Nurhadi diperiksa sebagai saksi.

Pada 13 Juli 2022, KPK juga memeriksa Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso untuk diminta keterangan terkait perkara ini. Ia juga diketahui sebagai adik ipar Nurhadi.

● han